



LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

TAHUN 2024



PT. BPRS MITRA HARMONI MALANG



LEMBAR PERSETUJUAN DAN
PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola

PT BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum Transparansi Penerapan Tata Kelola PT BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPRS yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders serta memperkuat perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness).

Malang, 29 April 2025

PT BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG

Menyetujui

Mohammad Makhmud, SE
Direktur Utama

Juanda, SE
Komisaris Utama

Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
Alamat	Jl. A Yani No. 20 G Blimbing Kota Malang
Nomor Telepon	0341 474630
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	03
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	19 Juli 2024
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	01
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	13 Februari 2025

Penjelasan Umum:

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, maka kepada BPRS diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness). Manajemen PT. BPRS Mitra Harmoni Malang menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPRS sebagai salah satu industri Perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang ke depan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil penilaian penerapan tata kelola BPRS menghasilkan nilai komposit 2 sehingga menghasilkan peringkat komposit 2 atau baik. Berdasarkan penilaian periode tahun 2024 beberapa hal yang menjadi perhatian adalah BPRS Mitra Harmoni Malang masih kurang maksimal dalam indikator 2024 penerapan tata kelola, sehingga hal tersebut selaras dengan kurang maksimalnya indikator hasil penerapan tata kelola. Pada faktor penerapan tugas dan tanggung jawab DPS, fungsi kepatuhan, dan fungsi audit intern harus lebih ditingkatkan sehingga pada faktor penerapan prinsip syariah dapat memberikan proses dan hasil yang sangat baik, baik pada aspek pembiayaan, pendanaan, dan operasional, karena pada dasarnya faktor- faktor penerapan tata kelola saling terkait satu sama lain. Kedisiplinan penerapan faktor- faktor tata kelola yang baik tentunya akan memberikan hasil yang baik pada penerapan dan pencapaian rencana bisnis bank di periode yang akan datang. Pemenuhan kompetensi SDI pada BPRS Mitra Harmoni Malang baik pengetahuan perbankan syariah dan ketentuan- ketentuan yang mengikat BPRS merupakan pilar penting untuk menunjang penerapan tata kelola agar mewujudkan tata kelola yang baik. Sebagaimana penilaian pada tahun 2024 masih terdapat kekurangan mengenai kompetensi SDI yang ada pada BPRS.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Mohammad Makhmud, SE
----	------	----------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
2. mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dengan baik, aman, lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
3. Menjaga likuiditas secara optimal
4. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar
5. Memastikan sistem/ prosedur operasional dan pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan
6. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan
7. Menindaklanjuti hasil evaluasi/ pemeriksaan OJK, Dewan Komisaris, Internal Audit dan Dewan Pengawas Syariah
8. Melakukan penilaian menyeluruh untuk mengetahui kelayakan usaha nasabah
9. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost of benefit
10. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme sumber daya insani
11. Mengoptimalkan SDI yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif
12. Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT sesuai dengan ketentuan

WEWENANG :

13. Membuat kebijakan dan ketentuan lainnya, serta surat keputusan yang tidak bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada, yang sejalan dengan kepentingan BPRS

14. Menyetujui semua laporan yang disampaikan kepada OJK, Dewan Komisaris, dan pihak berwenang lainnya
15. Meminta saran kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dalam upaya meningkatkan kinerja BPRS
16. Meminta saran kepada Audit untuk menindaklanjuti temuannya
17. Membuat kesepakatan- kesepakatan dengan pihak ketiga yang sesuai / berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya
18. Menyetujui pengeluaran rutin sesuai dengan wewenang
19. Menentukan suku nisbah maupun margin pembiayaan/piutang, Tabungan, Deposito, serta Dokumen jasa Lainnya
20. Memberi persetujuan dan merekomendasikan aplikasi pembiayaan
21. Menyetujui mutasi, promosi, mengangkat dan memberhentikan pekerja
22. Menilai prsetasi kerja para Kepala Bidang

2. Nama

Ifani Yudhanto, SH

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
 2. mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dengan baik, aman, lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
 3. Menjaga likuiditas secara optimal
 4. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar
 5. Memastikan sistem/ prosedur operasional dan pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan
 6. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan
 7. Menindaklanjuti hasil evaluasi/ pemeriksaan OJK, Dewan Komisaris, Internal Audit dan Dewan Pengawas Syariah
 8. Melakukan penilaian menyeluruh untuk mengetahui kelayakan usaha nasabah
 9. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost of benefit
 10. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme sumber daya insani
 11. Mengoptimalkan SDI yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif
 12. Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan APU PPT sesuai dengan ketentuan
- WEWENANG :**
13. Membuat kebijakan dan ketentuan lainnya, serta surat keputusan yang tidak bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada, yang sejalan dengan kepentingan BPRS
 14. Menyetujui semua laporan yang disampaikan kepada OJK, Dewan Komisaris, dan pihak berwenang lainnya
 15. Meminta saran kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dalam upaya meningkatkan kinerja BPRS
 16. Meminta saran kepada Audit untuk menindaklanjuti temuannya
 17. Membuat kesepakatan- kesepakatan dengan pihak ketiga yang sesuai / berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya

18. Menyetujui pengeluaran rutin sesuai dengan wewenang
19. Menentukan suku nisbah maupun margin pembiayaan/piutang, Tabungan, Deposito, serta Dokumen jasa Lainnya
20. Memberi persetujuan dan merekomendasikan aplikasi pembiayaan
21. Menyetujui mutasi, promosi, mengangkat dan memberhentikan pekerja
22. Menilai prsetasi kerja para Kepala Bidang

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS:

Kinerja PT BPRS Mitra Harmoni Malang pada Tahun 2024 mengalami pertumbuhan dan perbaikan kinerja, namun apabila dibandingkan dengan RBB 2024 belum sesuai target yang ditetapkan. Berdasarkan diskusi dan rapat yang telah teragendakan, selama Tahun 2024 terdapat hal-hal yang dilakukan Direksi: 1. Upaya peningkatan kualitas SDI melalui FGD serta pendidikan pelatihan baik internal maupun eksternal sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja bank serta menjaga visi dan misi perusahaan oleh seluruh SDI dalam mencapai tujuan dengan kerjasama yang baik. Terutama kualitas SDI dalam hal analisis pembiayaan serta SDI pembinaan dan penyelesaian guna meminimalisir risiko kredit, karena berdasarkan kinerja pada Semester 2 Tahun 2024 NPF dan rasio tunggakan pembiayaan lancar masih jauh dari target yang ditetapkan; 2. Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan dengan memanfaatkan database, potensi wilayah, dan potensi nasabah pendanaan yang sudah ada dengan tetap memperhatikan prinsip prudential banking dan prinsip syariah; 3. Mengembangkan jaringan yang ada untuk meningkatkan penghimpunan dana, khususnya dana yang beresiko rendah dan berbiaya murah; 4. Membuat inovasi produk pembiayaan dan pendanaan agar menarik minat calon nasabah. Kegiatan promosi agar dilakukan secara berkala baik secara langsung atau melalui media lain. Keikutsertaan dalam program Tabungan Ukhuwah bersama asbisindo lebih dimaksimalkan dan dioptimalkan karena belum memberikan kontribusi yang maksimal; 5. Memaksimalkan potensi kantor cabang dan kantor kas sebagai jaringan kantor untuk meningkatkan volume pembiayaan dan pendanaan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Juanda, SE
----	------	------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
3. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang

keuangan dan Perbankan; dan suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

8. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
9. Memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
11. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada Bank atas kepemilikan saham baik saham Bank maupun pada perusahaan lain.
12. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank.
13. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
14. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang Perbankan.

2.	Nama	Supriyanto, SE
----	------	----------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
3. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan; dan suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
9. Memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
11. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada Bank atas kepemilikan saham baik saham Bank maupun pada perusahaan lain.
12. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan

anggaran dasar Bank.

13. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
14. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang Perbankan.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Mengawasi lebih aktif atas strategi manajemen dalam meningkatkan volume pembiayaan dan menjaga kualitas pembiayaan melalui pembahasan yang lebih intensif dan berkala; 2. Dekom secara aktif mendukung Direksi dalam upaya pengembangan TI sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Bank untuk masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas rencana tersebut, BPRS akan bekerjasama dengan perusahaan fintech untuk mendukung pelayanan; 3. Dewan Komisaris secara aktif mendukung Direksi dalam upaya pengembangan dan inovasi produk pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan SEOJK No 10/POJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah, untuk meningkatkan volume pembiayaan dan pendanaan. Beberapa upaya BPRS termasuk untuk bergabung dengan program tabungan Ukhuwah; 4. Peningkatan volume pembiayaan agar fokus ke UMKM diringi dengan pertumbuhan jumlah debitur guna meminimalisir risiko. Serta penghimpunan dana agar fokus terhadap produk tabungan yang sudah ada untuk menjaga risiko likuiditas; 5. Kedepannya pembinaan perlu dilakukan tidak hanya untuk pembiayaan bermasalah akan tetapi untuk pembiayaan Write Off agar dapat termonitoring dan terselesaikan secara maksimal; 6. Memaksimalkan fungsi mobil kas dan kantor kas dalam meningkatkan pelayanan serta sarana promosi produk Bank; 7. Menambah jaringan komunitas dan memaksimalkan jaringan komunitas yang sudah ada; 8. Terus melakukan pendidikan dan pelatihan SDI dalam rangka penerapan MR, Prinsip Syariah, APU- PPT, PPPSPM dan anti fraud; 9. Mengarahkan dan memantau pengembangan Teknologi BPRS serta terhadap pelaksanaan literasi dan edukasi mengenai Teknologi BPRS kepada konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam POJK No. 3 Tahun 2023; 10. Terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sebagaimana POJK 15 Tahun 2024; 11. Mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola yang baik serta peringkat TKS yang sehat (Peringkat 2) selama Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota DPS

1.	Nama	H A Zul Hilmi
----	------	---------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab DPS:

1. DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah.
2. Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan

mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko Syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

3. DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
5. DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.
6. DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
7. DPS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS.
8. DPS wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
9. DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.	Nama	Syuhadak
----	------	----------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab DPS:

1. DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah.
2. Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko Syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
3. DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
5. DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.
6. DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit

atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.

7. DPS wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS.
8. DPS wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
9. DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi:

Setelah mempelajari produk-produk PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana atau pembiayaan yang mengacu pada ketentuan masing-masing, dan setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi pada operasional PT BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN- MUI. Akan tetapi dalam praktiknya, baik penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan operasional lainnya perlu mendapatkan pengawasan dan kedisiplinan dalam penerapan prinsip syariah karena masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Selain itu, evaluasi rutin dan peningkatan pengetahuan SDI mengenai prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

5. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

BPRS Mitra Harmoni Malang tidak memiliki fungsi komite.

6. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

BPRS Mitra Harmoni Malang tidak memiliki fungsi komite.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dewan Komisaris, dan DPS pada BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota DPS pada BPR Syariah

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi , anggota Dewan komisaris, dan anggota DPS pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR Syariah

Kepemilikan Saham Anggota DPS pada Kelompok Usaha BPR Syariah

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS pada Kelompok Usaha BPR Syariah.

9. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota DPS pada Perusahaan Lain

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS pada perusahaan lain.

10. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Syariah

1.	Nama	Mohammad Makhmud, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Bapak Juanda, Bapak Supriyanto - Pinjaman
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak Ada

	Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	
2.	Nama	Ifani Yudhanto, SH
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Bapak Mohammad Makhmud - Pinjaman
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Bapak Juanda, Bapak Supriyanto - Pinjaman
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

1.	Nama	Juanda, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Bapak Mohammad Makhmud - Pinjaman
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Bapak Supriyanto - Pinjaman
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
2.	Nama	Supriyanto, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

Hubungan Keuangan Anggota DPS pada BPR Syariah

1.	Nama	H A Zul Hilmi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota	Tidak Ada

	Direksi Lain di BPR Syariah	
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
2.	Nama	Syuhadak
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR Syariah

1.	Nama	PT SENTRA MODAL HARMONI
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
2.	Nama	MOHAMAD INDRA PERMANA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
---	------------------

11. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Syariah

1.	Nama	Mohammad Makhmud, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
2.	Nama	Ifani Yudhanto, SH
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

1.	Nama	Juanda, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

	Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	
2.	Nama	Supriyanto, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

Hubungan Keluarga Anggota DPS pada BPR Syariah

1.	Nama	H A Zul Hilmi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
2.	Nama	Syuhadak
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR Syariah

1.	Nama	PT SENTRA MODAL HARMONI
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak Ada

	Direksi Lain di BPR Syariah	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
2.	Nama	MOHAMAD INDRA PERMANA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

Tidak terdapat hubungan keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pemegang Saham pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

12. Rangkap Jabatan Anggota DPS

Tidak terdapat rangkap jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.

13. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1.1. Gaji Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp276.300.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp156.000.000
Jumlah DPS Penerima Gaji	2 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji DPS (Rp)	Rp84.000.000
--	---------------------

1.2. Tunjangan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp165.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp87.600.000
Jumlah DPS Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan DPS (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem DPS (Rp)	Rp0

1.4. Bonus Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Bonus	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Bonus	0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Bonus	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus DPS (Rp)	Rp0

1.5. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham DPS (Rp)	Rp0

1.6. Remunerasi lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Remunerasi lainnya	0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya DPS (Rp)	Rp0
---	------------

2.1. Perumahan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp24.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan DPS (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi DPS (Rp)	Rp0

2.3. Kesehatan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Kesehatan (Orang)	2 orang
--	----------------

Jumlah Nominal Kesehatan Direksi (Rp)	Rp11.520.000
Jumlah Komisaris Penerima Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp6.072.000
Jumlah DPS Penerima Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Kesehatan DPS (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp100.023.424
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp57.081.672
Jumlah DPS Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya DPS (Rp)	Rp7.000.000

14. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,41 : 1
-------------	-----------------

2. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,63 : 1
-------------	-----------------

3. Rasio (a) gaji anggota DPS yang tertinggi dan (b) gaji anggota DPS yang terendah

Rasio (a/b)	1,00 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,50 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang tertinggi

Rasio (a/b)	0,59 : 1
-------------	----------

6. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,98 : 1
-------------	----------

15. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	26 Januari 2024
----	---------------	-----------------

	Jumlah Peserta	61 orang
--	----------------	----------

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK
3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK
4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya
5. Hasil pemeriksaan Audit Internal

2.	Tanggal Rapat	22 Februari 2024
----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	4 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Evaluasi performance kantor pusat dan kantor kas
2. Rencana strategis tahun 2024
 - a. Pembukaan kantor kas Pakis
 - b. Launching produk baru tabungan ukhuwah
3. Menertibkan rapat bulanan sesuai dengan ketentuan (koordinasikan dengan dekom untuk jadwalnya)
4. Melaksanakan Program Kerja Dekom sebagaimana yang telah direncanakan
5. Pengawasan transaksi antar jemput untuk lebih ditingkatkan agar menghindari fraud

6. Melaksanakan penerapan apu-ppt dan penerapan budaya anti fraud di semua bagian
7. Pertumbuhan pembiayaan agar menjadi fokus dan menyesuaikan dengan RBB yang ditetapkan
8. Pertumbuhan tabungan masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu memperbanyak upaya promosi dengan memanfaatkan berbagai media promosi
9. Kinerja kantor kas harus lebih maksimal untuk membantu peningkatan volume pembiayaan dan tabungan
10. Faktor-faktor pada tata kelola BPRS yang masih belum baik untuk menjadi perhatian dan perbaikan
11. Sosialisasi mengenai profil perusahaan, tata tertib dan peraturan perusahaan, serta penggunaan sistem CBS terhadap karyawan perlu dilaksanakan setiap terdapat penambahan karyawan selain itu perlu diadakan FGD dengan pembicara dari internal perusahaan untuk menambah wawasan SDI mengenai product knowledge
12. Pejabat maupun karyawan perlu memahami job desc masing-masing
13. Meningkatkan pemantauan terhadap risiko-risiko dalam pembiayaan dan kepatuhan pada kegiatan BPRS
14. Peninjauan kembali PKS dengan lawyer

3. Tanggal Rapat **22 Februari 2024**

Jumlah Peserta **6 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK
3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK
4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya
5. Hasil pemeriksaan Audit Internal

4. Tanggal Rapat **22 Maret 2024**

Jumlah Peserta **6 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK
3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK
4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya
5. Hasil pemeriksaan Audit Internal

5. Tanggal Rapat **29 April 2024**

Jumlah Peserta **6 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK
3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK
4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya
5. Hasil pemeriksaan Audit Internal

6.	Tanggal Rapat	30 Mei 2024
----	---------------	-------------

	Jumlah Peserta	6 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK
3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK
4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya
5. Hasil pemeriksaan Audit Internal

7.	Tanggal Rapat	07 Juni 2024
----	---------------	--------------

	Jumlah Peserta	4 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Nasabah yang bermasalah perlu mendapat perhatian karena pada 6 bulan terakhir NPF BPRS Mitra Harmoni Malang meningkat.
2. KSU sebaiknya menganalisis dan dapat mendalami masalah yang terkait dengan beberapa periode terakhir sering masuk-keluarnya karyawan baru
3. Sewa gedung BPRS pada tahun 2025 akan habis sehingga harus dilakukan negosiasi terhadap pemilik gedung mengenai kelanjutan kegiatan sewa menyewa
4. Sosialisasi job desc, spesifikasi APU PPT, dan anti fraud kepada seluruh SDI untuk segera diagendakan sebagai refreshment atas sosialisasi sebelumnya
5. Materi dan evaluasi kaitan product knowledge marketing FO perlu diadadakan secara rutin
6. Pembiayaan sindikasi perlu mendapat perhatian
7. Pemasangan papan nama pada obyek agunan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan SOP
8. Untuk pembiayaan lebih besar sama dengan 500 jt Dewan Komisaris akan meninjau juga jaminan sebagai bahan diskusi pada komite pembiayaan
9. Pembiayaan PEP agar menjadi perhatian karena potensi risikonya tinggi dalam TPPU
10. Maraknya kasus judi online agar menjadi perhatian manajemen agar lebih intensif dalam melakukan pemantauan terhadap karyawan sebagai pencegahan terjadinya fraud
11. Meningkatkan pemantauan terhadap risiko-risiko dalam pembiayaan dan kepatuhan pada kegiatan BPRS
12. Aspek tata kelola yang masih minim agar diperbaiki dan ditingkatkan

8.	Tanggal Rapat	07 Juni 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Rapat: 1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang 2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK 3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK 4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya 5. Hasil pemeriksaan Audit Internal		
9.	Tanggal Rapat	10 Juli 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Rapat: 1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang 2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK 3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK 4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya 5. Hasil pemeriksaan Audit Internal		
10.	Tanggal Rapat	19 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Rapat: 1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang 2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK 3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK 4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya 5. Hasil pemeriksaan Audit Internal		
11.	Tanggal Rapat	25 September 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Rapat: 1. Persiapan dalam penerapan SAK EP pada BPRS perlu dilakukan meskipun pelaksanaannya belum ditentukan waktunya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan penerapan SAK EP: a. Perbaikan kualitas pembiayaan b. Penyelesaian pembiayaan NPF c. Penagihan pembiayaan WO		

- d. Perhitungan simulasi CKPN
2. Evaluasi efektivitas lawyer agar menjadi bahan pertimbangan dalam perpanjangan PKS dengan lawyer
3. Action plan dalam penurunan LAR
4. Sosialisasi job desc company profile, dan produk perbankan kepada SDI baru
5. Perlu adanya FGD tiap bagian untuk memperkuat pemahaman dan pencapaian target
6. Pembiayaan sindikasi perlu mendapat perhatian
7. Larangan dalam judi online terhadap karyawan sebagai pencegahan terjadinya fraud
8. Meningkatkan pemantauan terhadap risiko-risiko pada kegiatan BPRS
9. Aspek tata kelola yang masih minim agar diperbaiki dan ditingkatkan
10. SOP Pelindungan Konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta SOP Pelindungan Data Pribadi yang baru disusun dan disahkan agar dilaksanakan sesuai ketentuan
11. Perlu ada sosialisasi APU, PPT, dan PPPSPM maupun ketentuan baru lainnya kepada karyawan

12.	Tanggal Rapat	25 September 2024
	Jumlah Peserta	6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK
3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK
4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya
5. Hasil pemeriksaan Audit Internal

13.	Tanggal Rapat	28 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK
3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK
4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya
5. Hasil pemeriksaan Audit Internal

14.	Tanggal Rapat	29 November 2024
	Jumlah Peserta	6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK
3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK
4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya
5. Hasil pemeriksaan Audit Internal

15.	Tanggal Rapat	06 Desember 2024
	Jumlah Peserta	6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
2. Hasil pemeriksaan SIGAp OJK
3. Hasil pemeriksaan SIPENDAR OJK
4. Hasil Penilaian Tata Kelola dan TKS periode bulan sebelumnya
5. Hasil pemeriksaan Audit Internal

16.	Tanggal Rapat	10 Desember 2024
	Jumlah Peserta	4 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Mempersiapkan pembukaan kantor cabang sesuai dengan ketentuan
2. Berkaitan dengan RBB kantor kas yang akan menjadi SKK maka perlu mendapat perhatian kaitan FO dan AO yang akan ditempatkan di SKK
3. Perubahan menjadi Bank Perekonomian (nomenklatur) perlu mendapat perhatian karena terkait dengan pengikatan HT, branding, warkat, dan lain sebagainya
4. Persiapan dalam penerapan SAK EP pada BPRS perlu dilakukan meskipun pelaksanaannya belum ditentukan waktunya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan penerapan SAK EP:
 - a. Perbaikan kualitas pembiayaan
 - b. Penyelesaian pembiayaan NPF
 - c. Penagihan pembiayaan WO
 - d. Perhitungan simulasi CKPN
5. Evaluasi efektivitas lawyer agar menjadi bahan pertimbangan
6. Action plan dalam penurunan LAR
7. Pembiayaan sindikasi perlu mendapat perhatian
8. Larangan dalam judi online terhadap karyawan sebagai pencegahan terjadinya fraud
9. Meningkatkan pemantauan terhadap risiko-risiko pada kegiatan BPRS
10. Aspek tata kelola yang masih minim agar diperbaiki dan ditingkatkan
11. Pemantauan dalam penerapan APU-PPT dan PPPSPM serta strategi anti fraud agar dilakukan
12. Perlu memperhatikan kaitan perubahan ketentuan dan penambahan ketentuan yang telah berlaku dan akan berlaku pada tahun 2025 serta mensosialisasikan kepada seluruh karyawan

Rapat dewan komisaris diselenggarakan 16 (enam belas) kali dalam satu tahun.

16. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Juanda, SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	16 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Supriyanto, SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	16 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Rapat dewan komisaris diselenggarakan 16 (enam belas) kali dalam satu tahun.

17. Pelaksanaan Rapat DPS dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	08 Januari 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Pembahasan Rapat: Ketentuan Pembiayaan Sindikasi dengan Grup Syariah dan Grup konvensional Berdasarkan Prinsip Syariah.		
2.	Tanggal Rapat	01 Februari 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Pembahasan Rapat: Prinsip syariah terhadap produk tabungan ukhuwah yang diluncurkan oleh BPRS Mitra Harmoni Kota Malang sebagaimana yang telah dibuat prosedurnya pada SOP Tabungan Ukhuwah		
3.	Tanggal Rapat	27 Juni 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Pembahasan Rapat: 1. Evaluasi pemeriksaan berkas atas produk BPRS Mitra Harmoni Kota Malang antara lain untuk produk tabungan wadiah dan mudharabah, deposito, dan pembiayaan		

murabahah dan multijasa.

2. Kewajiban pemberitahuan pengkinian atau perubahan porsi bagi hasil yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi melalui sosial media dan dicetak serta ditampilkan dalam media informasi di dalam ruangan pelayanan BPRS maupun secara personal.

4.	Tanggal Rapat	26 September 2024
	Jumlah Peserta	6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

1. Penggunaan Dana Qardhul Hasan, Pendapatan dari Jasa Bank Konvensional, sera Ta'zir yang sesuai.
 - a. Sumber dana yang dapat digunakan untuk CSR dan Sumbangan Perbaikan Fasilitas Umum.
 - b. Pemanfaatan sumber dana untuk Dana Bergulir

5.	Tanggal Rapat	06 Desember 2024
	Jumlah Peserta	6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pembahasan Rapat:

Runtutan akad wakalah dan akad murabahah dalam pembiayaan dengan akad murabahah.

Rapat DPS diselenggarakan 5 (lima) kali dalam satu tahun.

18. Kehadiran Anggota DPS

Kehadiran Anggota DPS dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota DPS	H A Zul Hilmi
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota DPS	Syuhadak
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Rapat DPS diselenggarakan 5 (lima) kali dalam satu tahun.

19. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0 kasus

Pada Tahun Sebelumnya	
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota DPS

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0 kasus

Pada Tahun Laporan	
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.5. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama tahun 2024 tidak terdapat kecurangan atau fraud pada anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai tetap, pegawai tidak tetap pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

20. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai	0 kasus

kekuatan hukum yang tetap)

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian **4 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Permasalahan hukum perdata yang telah terselesaikan 1 (satu) diantaranya merupakan permasalahan hukum dengan tahun pendaftaran 2023 dan 3 (tiga) lainnya dengan tahun pendaftaran 2024. Sedangkan untuk empat kasus permasalahan hukum perdata yang dalam proses penyelesaian merupakan permasalahan hukum dengan tahun pendaftaran 2024.

21. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

22. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	05 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	CANTIKA LESTARI
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan kegiatan OJK dan Badan Amil Zakat Nasional kepada siswa berprestasi atas nama Cantika Lestari
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	05 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	MUHAMMAD FATHAN AL FATIH
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan kegiatan OJK dan Badan Amil Zakat Nasional kepada siswa berprestasi atas nama Muhammad Fathan Al Fatih
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	07 Mei 2024

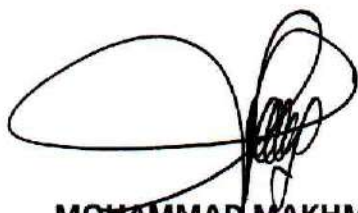
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	MIYONO
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan sembako kepada warga sekitar kantor BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
	Jumlah (Rp)	Rp128.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	07 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SAMSUL
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan sembako kepada warga sekitar kantor BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
	Jumlah (Rp)	Rp128.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	07 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	MOCH ILHAM
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan sembako kepada warga sekitar kantor BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
	Jumlah (Rp)	Rp128.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	07 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	IMAM SUKIDI
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan sembako kepada warga sekitar kantor BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
	Jumlah (Rp)	Rp128.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	07 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	EKO PURNOMO
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan sembako kepada warga sekitar kantor BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
	Jumlah (Rp)	Rp128.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	17 Juni 2024

	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	ICHSAN TAUFIQI KHABIBULLOH
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan hewan qurban untuk merayakan hari Idul Adha
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	17 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	RADIKTYA SURYA LAKSANA
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan hewan qurban untuk merayakan hari Idul Adha
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	02 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PANTI ASUHAN YASIBU
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan kepada Panti Asuhan untuk kegiatan sosial
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum kinerja PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG selama tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Malang, 28 April 2025

PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG



MOHAMMAD MAKHMUD, SE
Direktur Utama

bank syariah
mitra harmoni
bprs mitra harmoni kota malang



IFANI YUDHANTO, SH
Direktur YMFK

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA
MALANG Alamat : JL A YANI 20 G BLIMBING MALANG
Nomor Telepon : 0341 474630
Posisi Laporan : Desember 2024
Modal Inti : Rp 10,099,457,450
Total Aset : Rp 44,024,824,749

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG Tahun 2024, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit Tata Kelola sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.69	0.338
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.72	0.258
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1.84	0.184
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	2.8	0.21
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.15
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.16	0.162
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.1	0.158
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.28	0.171
11	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.2	0.11
12	Rencana Bisnis BPRS	1.5	0.075
13	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.1

Nilai Komposit	2
Predikat Komposit	Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.69)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum dikategorikan baik, namun dalam proses penerapannya perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga kemudian akan memberikan hasil yang baik juga. Selama tahun 2024 proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kategori baik dan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi termasuk dalam peringkat baik.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.72)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum dikategorikan baik, namun dalam proses penerapannya perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga kemudian akan memberikan hasil yang baik juga. Selama tahun 2024 proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam kategori baik dan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk dalam peringkat baik.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S + P + H : 1.84)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS secara umum dikategorikan baik, namun dalam proses penerapannya perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga kemudian akan memberikan hasil yang baik juga. Selama tahun 2024 proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam kategori cukup baik dan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah termasuk dalam peringkat baik.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Nihil

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS (Nilai S + P + H : 2.8)

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS secara umum mendapatkan peringkat cukup baik. Peningkatan struktur dan infrastruktur tata kelola dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS perlu ditingkatkan terutama dalam hal pemahaman SDM mengenai prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Dalam proses pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS mendapatkan predikat baik. Sedangkan berdasarkan hasil penerapan tata kelola masuk ke dalam predikat cukup baik, hal ini paling banyak karena dipengaruhi oleh laporan hasil audit intern menunjukkan masih terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

6. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Pelaksanaan benturan kepentingan secara keseluruhan dapat dimasukkan dalam kategori baik.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.16)

Penerapan fungsi kepatuhan secara keseluruhan termasuk dalam predikat cukup baik. Untuk periode yang akan datang manajemen akan meningkatkan proses penerapan tata kelola antara lain: perlu memastikan langkah yang diperlukan agar BPRS memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain; melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah; memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

Penerapan fungsi audit intern secara umum dinilai baik. Namun dalam prosesnya masih tergolong dalam kategori cukup baik. Sehingga peningkatan terkait proses penerapan fungsi audit intern perlu dilakukan, Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan harus lebih efektif dan memadai serta BPRS akan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penerapan fungsi audit ekstern dinilai sangat baik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.28)

BPRS telah membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.

11. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

Penerapan faktor tata kelola Batas maksimum penyaluran dana masuk dalam kategori baik. BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan OJK.

12. Rencana Bisnis BPRS (Nilai S + P + H : 1.5)

Penerapan tata kelola faktor Rencana bisnis BPRS telah dilaksanakan dan termasuk dalam kategori baik, baik dari segi struktur dan infrastruktur, proses, maupun hasil penerapannya.

13. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan pada BPRS termasuk dalam kategori baik. baik dari segi struktur dan infrastruktur, proses, maupun hasil penerapannya.

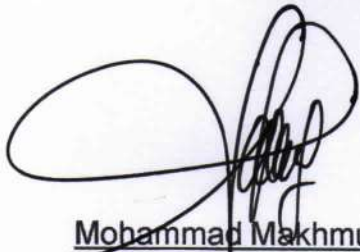
C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

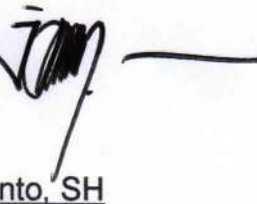
Hasil penilaian penerapan tata kelola BPRS menghasilkan nilai komposit 2 sehingga menghasilkan peringkat komposit 2 atau baik. Berdasarkan penilaian periode tahun 2024 beberapa hal yang menjadi perhatian adalah BPRS Mitra Harmoni Malang masih kurang maksimal dalam indikator 2024 penerapan tata kelola, sehingga hal tersebut selaras dengan kurang maksimalnya indikator hasil penerapan tata kelola. Pada faktor penerapan tugas dan tanggung jawab DPS, fungsi kepatuhan, dan fungsi audit intern harus lebih ditingkatkan sehingga pada faktor penerapan prinsip syariah dapat memberikan proses dan hasil yang sangat baik, baik pada aspek pembiayaan, pendanaan, dan operasional, karena pada dasarnya faktor-faktor penerapan tata kelola saling terkait satu sama lain. Kedisiplinan penerapan faktor-faktor tata kelola yang baik tentunya akan memberikan hasil yang baik pada penerapan dan pencapaian rencana bisnis bank di periode yang akan datang. Pemenuhan kompetensi SDI pada BPRS Mitra Harmoni Malang baik pengetahuan perbankan syariah dan ketentuan-ketentuan yang mengikat BPRS merupakan pilar penting untuk menunjang penerapan tata kelola agar mewujudkan tata kelola yang baik. Sebagaimana penilaian pada tahun 2024 masih terdapat kekurangan mengenai kompetensi SDI yang ada pada BPRS.

Malang, 21 Januari 2025

PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG


Mohammad Makhmud, SE
Direktur Utama


bank syariah
mitra harmoni
bprs mitra harmoni kota malang


Ifani Yudhanto, SH
Direktur YMKF

Menyetujui,



Juanda, SE
Komisaris Utama